



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **08** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

**MEDIA** : 1. Indo Pos 6. Lampu Hijau 11. Rakyat Merdeka 16. Harian Terbit  
2. Jawa Pos 7. Media Indonesia 12. Republika 17. Sinar Harapan  
3. Kompas 8. NonStop 13. Suara Karya 18.  
4. Koran Sindo 9. Pos Kota 14. Sentana  
5. Koran Tempo 10. Pelita 15. Warta Kota

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



foto: deny

Petugas Sudin Perhubungan Jakpus, melakukan uji coba identifikasi surat kendaraan melalui scanning barcode.

## Identifikasi Surat Kendaraan Gunakan Scanning Barcode

**GAMBIR (Pos Kota)** – Identifikasi kelengkapan surat kendaraan menggunakan sistem barcode mulai diuji-coba terhadap mikrolet jurusan Tanah Abang – Kota di Jalan Gajah Mada, Gambir, Kamis (7/5).

“Pada dasarnya sistem seperti ini sudah ada sejak Tahun 2008, namun sempat bisa dibilang mati suri. Saya berpikir kenapa teknologi seperti ini tidak kita terapkan lagi,” terang Kepala Sdud Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat, Muslim.

Menurut Muslim, identifikasi dengan menggunakan sistem barcode memiliki keunggulan keakuratan dan kecepatan dibandingkan cara manual. “Di sini petugas tidak perlu lagi meminta sopir menunjukkan surat-surat kendaraan, melainkan cukup menscanning barcode

di stiker mobil. Maka nanti secara otomatis, data akan ditampilkan pada handphone petugas,” jelasnya.

### HINDARI MACET

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, dalam satu jam seorang petugas dapat melakukan identifikasi puluhan mikrolet. Jauh lebih banyak bila dibandingkan pada saat identifikasi manual. “Ini juga dapat menghindari kemacetan saat kita melakukan razia angkot di pinggir-pinggir jalan,” paparnya.

Keberadaan teknologi tersebut memang saat ini masih sebatas uji coba dan terkendala dalam pengoperasian. “Baru satu petugas yang memiliki softwernya, dan diharapkan dapat dukungan dari kepala dinas agar ini dapat berjalan,” ungkapnya. (deny/ak)



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat**

Tanggal : **08**

Bulan : **MEI**

Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b> :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

**Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Awas, Ribuan Pohon Rawan Tumbang

**GAMBIR (Pos Kota)** – Ribuan pohon di wilayah Jakarta Pusat rawan tumbang mengancam para pengguna jalan, terutama saat memasuki pergantian musim. Sudin Pertamanan dan Pemakaman, diminta melakukan penopongan.

“Ini kan masuk pancaroba seperti ini, hampir setiap hari ada angin kencang dan banyak pohon dengan usia tua tumbang di Jakarta Pusat. Kami khawatir tertimpa pada saat melintas di

bawahnya, dan karenanya meminta petugas melakukan penopongan,” ucap Wawan, 24, warga, Kamis (7/5).

Sebelumnya, hampir setiap hari di Jakarta Pusat didapati pohon tumbang dan terakhir memakan korban luka seorang pengendara motor, (Pos Kota, 7/5). Pohon yang tumbang ukuran besar, kebanyakan karena tua diterpa angin kencang.

Data yang diperoleh, sejumlah pohon rindang

dengan usia puluhan tahun banyak terdapat di wilayah Menteng, Cempaka Putih, Kemayoran, dan Gambir. Meski ada penopongan, namun tidak menyeluruh.

### TIAP HARI

Kepala Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat, Temmy Kendra Putra, mengatakan hampir setiap hari melakukan penopongan pohon-pohon rindang. “Memang belum semua ditoping.” (deny/ak)



Hari : **JUMAT**      Tanggal : **8**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, **11**, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

# DKI Kembali Lelang Jabatan

**JAKARTA** – Pemrov DKI Jakarta kembali membuka lelang jabatan. Kali ini lelang untuk seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I B) dan pimpinan tinggi pratama (eselon II).

Lelang eselon I B untuk satu kursi Deputy Gubernur Bidang Tata Ruang dan eselon II untuk 30 kursi. Lelang jabatan itu bertujuan untuk mencari sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, lelang jabatan dibuka sesuai dengan amanah UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam peraturan tersebut termuat bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang berniat meningkatkan karier birokrasi pemerintah diberi kesempatan untuk mendaftar. "Pendaftaran kami mulai buka secara online pada 8 Mei 2015 melalui [jakgov.jakarta.co.id](http://jakgov.jakarta.co.id)," kata dia di Balai Kota kemarin.

Saefullah menjelaskan, lelang Deputy Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dilakukan lantaran posisi tersebut telah kosong sejak lama. Persyaratan untuk mendaftar yakni minimal berusia 57 tahun, pendidikan paling rendah strata 2 (S-2) jurusan Teknik Arsitektur atau Perencanaan Wilayah Kota, dan memiliki pengalaman kerja di bidang tata ruang dan lingkungan hidup minimal tiga tahun. Selanjutnya pendaftar telah menduduki pangkat atau golongan pembina utama muda (IV/C), sedang, atau pernah menduduki jabatan eselon IIA.

Lelang eselon II dilakukan sebagai stok pegawai apabila kursi pejabat kosong karena suatu hal. Seluruh pejabat eselon III diperbolehkan melamar dan mengikuti tes ini jika memenuhi persyaratan.

**"Mereka akan dijadikan stok manakala ada pejabat eselon II yang kosong karena suatu hal dan tentu dipilih oleh gubernur."**

**SAEFULLAH**  
Sekda DKI Jakarta

"Pada 15 Juni kami harapkan sudah mendapat hasil seleksi terbuka ini. Nanti juga akan ada paparan lagi seleksi 30 orang untuk stok. Mereka akan dijadikan stok manakala ada pejabat eselon II yang kosong karena suatu hal dan tentu dipilih oleh gubernur," ungkapnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menuturkan, proses lelang jabatan dilakukan dengan lima tahapan. Dimulai dari seleksi administrasi, tes kompe-

tensi dan tes integritas rekam jejak, tes kepemimpinan dan independensi, tes kesehatan, serta wawancara dengan gubernur.

Panitia lelang ada sembilan orang, terdiri atas empat orang dari Pemprov DKI Jakarta dan lima orang dari akademisi atau profesional. "Selaku ketua panitia seleksi, saya tegaskan tidak akan ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun," tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendukung langkah pemrov yang ingin menyiapkan SDM untuk jabatan eselon II dengan menggelar *assessment* tahun ini. Politikus PDIP itu berpendapat, dengan kesiapan SDM, penempatan mereka juga akan lebih mudah dan tepat.

Menurutnya, saat ini birokrasi pemerintahan di DKI Jakarta sangat membutuhkan SDM yang memenuhi kualifikasi. Khususnya jabatan eselon I dan II yang tempatnya terbatas atau tidak berimbang dengan jumlah SDM.

Rio menilai, langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta ini juga sebuah terobosan dan bagian dari upaya membenahi sistem birokrasi pemerintahan dengan membuat penguatan SDM. Bila melihat dari sudut pandang produktivitas, langkah tersebut diyakini bisa efektif bagi kelangsungan roda pemerintahan di Ibu Kota.

"Efektif atau tidak terobosan itu, kita lihat dalam evaluasi. Dari sudut pandang produktif, langkah tersebut bisa efektif," tandasnya.



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat**

Tanggal : **08**

Bulan : **MEI**

Tahun : **2015**

MEDIA	Hari : <b>Jumat</b>	Tanggal : <b>08</b>	Bulan : <b>MEI</b>	Tahun : <b>2015</b>
1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit	
2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan	
3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.	
4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana		
5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota		
Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,				
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,	

## Sejumlah Pejabat Eselon II Bakal Lengser

# Kinerja Pejabat Tak Memuaskan, Ahok Rombak Formasi Kabinet

“Sekarang kan ada sistem e-budgeting dan dia harus selesaikan lelang. Lelang dulu baru uangnya keluar, jangan dikeluarkan uang dulu baru lelang. Kamu habis waktu 1-5 bulan hanya untuk lelang dan program enggak jalan, itu yang jadi indikator



Pejabat eselon II DKI Jakarta

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahjeda Purnama alias Ahok memiliki beberapa indikator penilaian kinerja pejabat Pemprov DKI. Apabila pejabat DKI tidak memiliki kinerja baik dan tidak mampu memenuhi indikator itu, Ahok tak segan memecat atau menjadikannya staf pejabat itu. Orang nomor satu di Pemprov DKI ini punya penilaian khusus terhadap seorang pejabat di Pemprov DKI.

“Sekarang kan ada sistem e-

budgeting dan dia harus selesaikan lelang. Lelang itu baru uangnya keluar, jangan dikeluarkan uang dulu baru lelang. Kamu habis waktu 1-5 bulan hanya untuk lelang dan program enggak jalan, itu yang jadi indikator,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis (7/5). Ia pun akan menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah untuk menindaklanjuti permasalahan kepegawaian ini. Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Saefullah mengatakan, semua anggaran oleh semua kerja perangkat daerah (SKPD)

dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pejabat DKI. Instansinya selalu melakukan monitor atau pengawasan di Badan Layanan Pengadaan Berbasis dan Jasa Pemerintah (BLJP) DKI. Dari sana akan terbit SKPD maupun UKPD mana yang sudah melaksanakan lelang maupun yang belum menyelesaikan dokumennya lelang. Kemudian, untuk dinas teknis, dia juga melihat indikator pelaporan serta pengadaan warga. Perprov DKI lebih memunculkan aplikasi QJUE

yang bisa diunduh di Android Playstore. Melalui aplikasi ini, dapat terlihat form, carter, wali kota, saku dinas, maupun dinas mana yang banyak pengaduan warganya. “Kami juga melihat respon terhadap pengadaan warga itu. Biasanya sih yang banyak pengadaan itu Dinas Pekerjaan Umum Tirta Air dan Bina Marga, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUM-KMP), Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, dan Dinas Perumahan,” kata Saefullah. Sementara itu, sejumlah pejabat masuk dalam bursa reshuffle kabinet Ahok.

“Nanti akan ada pengumuman dan pengantian pejabat eselon II, III hingga Camat dan Lurah,” ujar Sumber Novotop di Balai Kota, kemarin.

Sumber mengisahkan daftar pejabat eselon II yang akan dimutasi adalah Kepala Dinas Peronda dan Olahraga (Ordin) DKI Jakarta Zairil Soleman yang saat ini tersandung kasus dugaan korupsi untuk portable power supply (UPS).

Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PI) DKI Harris Pindratno akan digantikan Kasudin PE Jakarta Timur Itri Kusni, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Berjumin Bakit digantikan Sumardi Sinaga kepala UPY Perparkiran Distrik DKI. Selain itu, Sekwan DPRD DKI A Soter Hamzah juga masuk dalam radar Ahok untuk diganti dengan pejabat lain.

Selain itu beberapa eselon III diantaranya Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tirta Air Jakarta Utara Sisca Herawati akan digantikan Amir Pangribuan saat ini menjabat Kasie Kecamatan Tirta Air Perpipaan dan Kasudin Bina Marga Jakarta Utara Wasito digantikan Arif Fauzi Rihangan yang saat ini menjabat Kasie Perumahan Jalan dan Jembatan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara. (BCR/AZ)



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Jumat** Tanggal : **08** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Palita	15. Warta Kota	
Halaman :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,			
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,	Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,		

**Penyidik Angkut Dokumen Dari Kantor Bappeda**

# Pejabat DKI Mulai Digarap Bareskrim

**Penyidik Bareskrim Polri langsung bergerak cepat menangani kasus korupsi UPS. Kamis (7/5), sejumlah pejabat DKI mulai digarap penyidik.**



Andi Baso sebelumnya merupakan Kepala Bappeda DKI pada tahun anggaran 2014 dan Wahyu menjabat sebagai Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan Bappeda DKI.

Tuty mengaku, Wahyu telah mengirim pesan singkat kepadanya untuk tidak mengikutinya rapat hari ini karena menentu pengisian Bareskrim. "Pak Wahyu SMS saya, minta izin tidak ikut rapat karena dipanggil Bareskrim sebagai saksi. Cuma saya nggak tahu saksi apa," kata Tuty.

Selama dua pekan ini, penyidik telah mengumpulkan data APBD 2012-2014 dari Bappeda DKI. Bahkan beberapa dokumen telah diangkut oleh penyidik ke Bareskrim. Dokumen ada yang berbentuk hard copy maupun soft copy.

"Jadi, mereka meminta dokumen APBD dari tahun 2012-2014, dan kami kasih. APBD 2015 mereka tidak minta ya," kata Tuty.

Saat meminta dokumen itu,



Pejabat Bappeda DKI asal acara sosialisasi Input APBD di Balai Kota DKI beberapa waktu lalu.

lanjut Tuty, penyidik Bareskrim meminta data detail pengadaan perangkat *uninterruptible power supply* (UPS) dari tahun anggaran 2014.

Tak hanya data pengadaan UPS, Bareskrim juga meminta data detail pengadaan *scanner* untuk sekolah-sekolah. Sebab, nilai pengadaan *scanner* bagi tiap sekolah terbilang fantastis.

"Ditanya juga proses penyelesaiannya bagaimana di pendidikan, lebih ditanya perencanaan penganggernya saja," kata Tuty.

Tak hanya Bareskrim, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga meminta doku-

men APBD kepada Bappeda DKI. Tuty mengatakan, Bappeda memberi dokumen APBD 2014 kepada BPK.

Selain itu, BPK juga meminta data anggaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Tuty mengaku tidak khawatir atas penyidikan ini.

"Karena kan ini sudah merupakan bagian upaya transparansi yang dibangun Gubernur. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya,"

ucap Tuty.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan akan melakukan pemeriksaan beberapa PNS DKI yang diduga terlibat dalam kasus pengadaan UPS.

Pemeriksaan dilakukan di masing-masing kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Selama dua pekan ini, penyidik Bareskrim dan Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah menyambangi Bappeda DKI untuk meminta data yang dibutuhkan. (AZ/BCR)

ADALAH Asisten Sekda Bidang Keuangan DKI Andi Baso Mappoleonoro dan Inspektur Pembinaan Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Pemkot Jakarta Selatan Wahyu Wijayanto yang diduga menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Penganggilan dua pejabat ini dibenarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Hari ini Pak Andi Baso dipanggil Bareskrim juga. Belum tahu masalah apa," kata Ahok di Balai Kota.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati mengatakan, pemeriksaan itu terkait saat kedua pejabat tersebut menjabat sebagai pegawai Bappeda.



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Jumat**      Tanggal : **08**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

# Audit BPK Temukan Kunker Fiktif

## Penegak Hukum Tak Boleh Membiarkan

**GAMBIR** - Satu per satu borok DPRD DKI terus terbuka. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2014 ternyata menyimpulkan ada permasalahan alokasi anggaran dalam perjalanan dinas DPRD DKI Jakarta. Dari alokasi kunjungan kerja (kunker) Rp 1,912 miliar, tahun lalu hanya tersisa Rp 187,6 juta.

Di balik penggunaan dana yang masih tersebut, ternyata ada penyalakan. Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, ada sejumlah politikus Kabon Sirih yang menghabiskan-lumbar uang hingga merugikan keuangan negara.

Antara lain, pada 2013, ditemukan bukti-bukti perjalanan dinas berupa tiket pesawat atas nama lima anggota DPRD yang berinisial TY, EL, RN, IS, dan AL. Ternyata, kelimaanya tidak ikut kunker. Ini terbukti dengan tidak ditemukannya nama mereka dalam manifest pesawat.

Rupanya, kelimaanya tidak ikut karena sakit atau melaksanakan penugasan partai.

Meski tidak ikut kunjungan kerja, TY, EL, RN, IS, dan AL tetap mengambil uang saku harian dan akomodasi Rp 24,13 juta per orang. Harga tiket mereka pun di-mark up hingga Rp 69,912 juta dengan modus biaya ril berbeda dengan dokumen pertanggungjawaban.

Alasan mereka yang tidak masuk akal ketika *me-mark up* adalah pembiayaan biaya transportasi perjalanan dinas menggunakan metode turnsum. Bahkan menggunakan perhitungan biaya ril (*at cost*) sesuai dengan Pergub DKI No 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. "Ini sangat memalukan. Uang kecil saja dihajar. Bagaimana uang besar," kata Uchok ketua.

Pada 2014, negara lagi-lagi diru-

gikan Rp 81,222 juta. Perinciannya, Rp 66,484 karena penggelembangan harga, Rp 11,691 juta dari tiket atas nama orang bukan anggota DPRD, dan Rp 3,046 juta lantaran tanggal perjalanan dinas tidak sesuai dengan konfirmasi Garuda. "Totalnya, negara diperkirakan merugi Rp 175,265 juta karena anggota dewan ingin jalan-jalan," jelas mantan aktivis PMI itu. Berdasar dokumen hasil pemeriksaan BPK yang menyebutkan adanya kerugian negara, Uchok merendesak penegak hukum mengusut kasus tersebut.

### OPRD Siapkan Bantuan Hukum

Sementara itu, penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) senilai Rp 330 miliar pada APBD 2014 semakin dalam. Bukan tidak mungkin ada tersangka baru dalam waktu dekat dari kalangan DPRD DKI periode 2009-2014.

Dugaan akan adanya tersangka baru itu rupanya sudah dirasakan para pimpinan DPRD DKI. Buktiannya, hari ini, mereka mengagendakan pertemuan untuk membahas pemberian bantuan hukum jika ada anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. "Kami sudah pertimbangkan matang-matang untuk berikan bantuan hukum. Itu *laz* hak mereka," terang Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik.

Bantuan tersebut tidak bersifat mengikat. Artinya, anggota legislatif yang terseret kasus itu berhak menentukan pengacara sendiri. "Kami akan bahas dulu bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum. Termasuk soal pembiayaannya," ungkap Taufik.

Setelah rapat, pimpinan DPRD akan mengumpulkan seluruh

anggota DPRD periode lalu yang saat ini kembali terpilih. Terutama legislator yang sudah dipanggil sebagai saksi. Mereka bakal membahas mekanisme pemberian bantuan hukum jika ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan UPS. "Semoga tidak ada yang jadi tersangka dari dewan," tutur Taufik berharap.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengakui, pimpinan DPRD bakal membahas masalah tersebut. Namun, bantuan hukum itu hanya bersifat kepedulian sesama anggota DPRD meski hingga kini belum ada yang ditetapkan polisi sebagai tersangka. "Ini bentuk antisipasi kami," ujarnya.

Koordinator Komisi E DPRD 2009-2014 Abraham Lenggana alias Laling dan anggota Komisi E DPRD Fidi Zulfikar Hasbiyanto telah diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi kasus pengadaan UPS yang diduga merugikan negara Rp 50 miliar. Kabareskrim Ijen Pol Budi Wasesu pekan lalu menuntaskan, penyidik siap meningkatkan status para saksi yang diperiksa menjadi tersangka.

Pras mengakui, kasus korupsi UPS menyita energi DPRD sehingga berimbas pada kinerja dewan. Karena itu, dewan ingin secepatnya keluar dari masalah dengan menyiapkan bantuan hukum untuk anggota DPRD yang diperiksa sebagai tersangka hingga statusnya jelas. "Kami ingin masalah ini cepat selesai. Mohon maaf pada warga DKI," katanya. (riz/co1/nuc)



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Jumat** Tanggal : **08** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b> :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	
<b>Halaman</b> :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,			<b>Kolom</b> : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			

**Aspirasi  
Warga Jakarta**



**Kirim SMS Bisa Berikut Foto  
Ke 0813 8505 1009**

atau telepon langsung redaksi (021) 638 51729  
foto kirim ke e-mail: poskotawarga@gmail.com

**Terimakasih, Lampu Jalan Sudah Menyala**

- Kepada. Yth. Kasudin PJU Jakarta Pusat. Kami a/n. Ketua Rt.011/01. Mengucapkan terima kasih lampu penerangan Jalan Bungur Besar 19 sudah menyala dan terima kasih atas kerjasamanya. (08128352xxx)

**Terimakasih, PKL Sudah Ditetapkan**

- Terima kasih kepada bapak Gubernur, Kasatpol PP dan Lurah Petamburan yang telah menertibkan PKL dan mengeruk saluran air di Petamburan 5 cuma di Petamburan 4 belum ditertibkan. Mohon ditindaklanjuti. Terima kasih. (081510131xxx)

**Bongkar Beton di Tengah Jalan**

- Kepada. Yth. Dishub dan Polantas Jakarta Utara di Jl. Danau Sunter Selatan dari Kemayoran mau belok kanan ke danau ada beton ditengah jalan tolong dibongkar sudah sering ditabrak mobil. Terima kasih. (081297683xxx)

**Tertibkan Parkir Bus  
AKAP**

- Yth. Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Lurah Jakarta Pusat. Tolong bus Akap yang ada di sekitar Roxy yang parkir untuk ditertibkan, karena sangat mengganggu dan menimbulkan penyempitan jalan dan aktivitas lainnya. Terima kasih. (085719525xxx)